

# PERKEMBANGAN EKONOMI DAN ADMINISTRASI PADA MASA BANI UMAYYAH DAN BANI ABBASIYAH

Oleh : Naila Farah<sup>1</sup>

## ABSTRAK

*Sektor pembangunan di bidang ekonomi merupakan masalah sentral dalam pembangunan suatu negara. Ia dapat dikatakan sebagai tulang punggung atau bahkan jantung dari kehidupan suatu negara. Tanpa didukung oleh ekonomi yang kuat, mustahil suatu negara dapat melaksanakan pembangunan-pembangunan di bidang yang lain secara baik dan sempurna. Perkembangan perekonomian pada masa pemerintahan Dinasti Umayyah secara umum sudah mulai meningkat dibanding dengan masa sebelumnya. Meningkatnya perekonomian yang membawa kepada kemakmuran rakyat pada dinasti ini, sebenarnya tidak terlepas dari kebijaksanaan-kebijaksanaan yang dilakukan khalifah, di samping dukungan masyarakat terhadap kebijaksanaan-kebijaksanaan tersebut. Dalam masa permulaan pemerintahan Bani Abbasiyyah, pertumbuhan ekonomi (economic growth) dikatakan cukup stabil dan menunjukkan angka vertikal. Devism negara berlimpah-limpah, uang masuk lebih banyak dari pada pengeluaran. Khalifah al-Mansur merupakan tokoh ekonom Abbasiyyah yang telah mampu meletakkan dasar-dasar yang kuat dalam bidang ekonomi dan keuangan negara. Keutamaan al-Mansur dalam menguatkan dasar Daulah Abbasiyyah dengan ketajaman pikiran, disiplin, dan adil adalah sama halnya dengan Khalifah Umar ibn Khattab dalam menguatkan Islam.*

Kata Kunci : *Bani Umayyah, Bani Abbasiyyah, Ekonomi dan Administrasi*

---

<sup>1</sup> Penulis adalah dosen tetap pada Fakultas Addin IAIN Syekh Nurjati Cirebon

## BANI UMAYYAH

Periode negara Madinah berakhir dengan wafatnya Khalifah Ali ibn Abi Thalib. Tokoh yang naik ke panggung politik dan pemerintahan adalah Muawiyah ibn Abi Sufyan, gubernur wilayah Syam sejak zaman Khalifah Umar.

Muawiyah ibn Abi Sufyan adalah khalifah pertama pada masa dinasti Bani Umayyah. Terbentuknya dinasti ini dan diakuinya secara resmi Muawiyah memangku jabatan khalifah pada tahun 661 M./41 H.<sup>2</sup> peristiwa ini terjadi setelah Hasan ibn Ali yang dibai'at oleh pengikut setia Ali menjadi khalifah sebagai pengganti Ali, mengundurkan diri dari gelanggang politik, sebab ia tak ingin lagi terjadi pertumpahan darah yang lebih besar, dan menyerahkan kekuasaan sepenuhnya kepada Muawiyah. Sikap Hasan ibn Ali ini dalam sejarah dikenal dengan tahu persatuan (*'Am al-Jama'at*).<sup>3</sup>

Sosok muawiyah dikenal sebagai seorang politikus dan administrator yang pandai. Umar bin Khattab sendiri pernah menilainya sebagai seorang yang cakap dalam urusan politik pemerintahan, cerdas dan jujur.<sup>4</sup> Ia juga dikenal sebagai seseorang yang ahli bersiasat, pandai mengatur urusan duniawi dan bijaksana<sup>5</sup> disamping kegigihan dan keuletannya serta kesediaannya menempuh segala cara untuk mencapai cita-citanya, karena pertimbangan politik dan tuntutan situasi.<sup>6</sup> Dengan kemampuan dan bakat kepemimpinan yang dimilikinya tersebut Syed Mahmudinnasir mengatakan

---

<sup>2</sup> J. Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah Ajaran Sejarah dan Pemikiran* (Jakarta: PT. Raja grafindo Persada, 1994) hal. 162. Lihat juga: William L. Cliveland, *A History of The Modern Middle East* (San Francisco: Westview Press, 1994) hal. 10. Jadi bukan pada tahun 660 M/40 H, karena pada saat ini Muawiyah memproklamirkan diri sebagai khalifah di Iliya (Jerusalem), setelah pihaknya dinyatakan sebagai pemenang oleh majlis tahkim (Lihat Philip K. Hitti, *History of Arabs* (London: Macmillan, 1974) hal. 189. Stephan dan Nandy Renart, *Concise, encilopedy of Arabic Civilazation* (Amsterdam: Jambatan, 1966) hal. 377.

<sup>3</sup> J. Suyuthi Pulungan, *op.cit.*, hal. 163.

<sup>4</sup> *Ibid*

<sup>5</sup> Ahmad Syalabi, *Tarikh al-Islamy Wa Hadhratul Islamiyah* (Mesir: Maktanbah Nahdhah, 1978) hal. 37

<sup>6</sup> J. Syuyuthi Pulungan, *Loc.Cit*

*“He secured The services of ablest leaders, administrators, and politician of the time”.*<sup>7</sup>

Sejalan dengan watak dan prinsip Muawiyah tersebut, serta pemikirannya yang perspektif dan inovatif, ia membuat berbagai kebijaksanaan dan perubahan dalam sistem pemerintahannya, termasuk dalam bidang ekonomi dan administrasi. Sebagai follow-upnya, upaya-upayanya ini dikembangkan dan disempurmakan oleh para penggantinya.<sup>8</sup>

Berangkat dari pola berfikir di atas, pembahasan dalam tulisan ini adalah tentang perkembangan ekonomi dan administrasi pada masa pemerintahan Dinasti Bani Umayyah. Sebelum itu, akan dibahas tentang kondisi sosial dan beberapa kebijaksanaan politik Dinasti Umayyah.

## **I. KONDISI SOSIAL DAN KEBIJAKSANAAN POLITIK DINASTI BANI UMAYYAH**

### **A. Kondisi Sosial**

Masyarakat Dinasti Bani Umayyah, sekalipun pro-arab-isme, namun tidak menjauhkan diri dari golongan non-muslim.<sup>9</sup> Bahkan golongan non-islam memperoleh jabatan-jabatan dalam pemerintahan dan dipercaya oleh para raja.<sup>10</sup> Sikap ini paling tidak, telah membantu Dinasti Umayyah untuk mencapai kemajuan ilmiah dan berhasil menterjemahkan buku-buku dari bahasa asing kedalam bahasa arab. Seperti itu, Muawiyah mengangkat dokter pribadinya dari orang yang banyak menerjemahkan buku-buku mengenai ilmu kedokteran ke dalam bahasa arab, orang itu adalah Ibnu Asal.<sup>11</sup>

Disamping itu Muawiyah juga pernah mengundang seorang ahli riwayat yang bernama Ube'id, dari yaman, untuk di manfaatkan dalam mengarang

---

<sup>7</sup> Syed Mahmudunnasir, *Islam Its Concept and History*, (New Delhi: Kitab Bhavan, 1981) hal. 151

<sup>8</sup> J. Suyuthi Pulungan, *Op.Cit*, hal. 164

<sup>9</sup> Fuad Mohd. Fachruddin, *Perkembangan Kebudayaan Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1985) hal. 38, lihat juga K. Ali, *A Study Of Islamic History*, (India: Idarah Adabiyat, 1980) hal. 218

<sup>10</sup> Fuad Mohd. Fachruddin, *Loc.Cit*

<sup>11</sup> *Ibid*

buku-buku cerita yang diperlukan untuk melalaikan rakyat, dan sekaligus menjauhkan rakyat dari keterlibatannya dengan persoalan-persoalan politik didalam negeri. Para ahli cerita ini juga dikirimkan ke masjid-masjid di berbagai kota untuk “menentramkan” rakyat agar patuh pada pemerintahan yang berkuasa.<sup>12</sup> Indikasi semacam ini menunjukkan kepada kita bahwa tujuan dipanggil dan diundangnya para ahli riwayat tidak lain adalah untuk mengalihkan perhatian masyarakat dari hal-hal yang bersifat politis.

Di sisi lain, nilai-nilai toleransi sudah terbina dan teraplikasikan dalam kehidupan masyarakat Mu’awiyah. Hal ini sejalan dengan pendapat K. Ali yang menyatakan bahwa: “Mu’awiyah telah melindungi gereja, katedral, kelenteng, dan tempat-tempat suci lainnya.”<sup>13</sup> Sikap Mu’awiyah ini adalah merupakan salah satu indikasi exisnya nilai-nilai toleransi pada masyarakat Bani Umayyah.

Dalam bidang ilmu pengetahuan, masyarakat Bani Umayyah memiliki sikap tertentu. Mereka berpandangan bahwa ilmu pengetahuan adalah hak milik bersama dan merupakan pemberian Allah kepada hamba-Nya.<sup>14</sup> Ini berarti bahwa Islam tidak melarang mengambil ilmu pengetahuan dari orang lain yang non-Islam, tapi hendaklah ilmu pengetahuan yang diambilnya itu difilter untuk dijadikan ilmu yang bernilai.

Di balik sukses yang diperolehnya, Dinasti Bani Umayyah juga banyak menghadapi keributan dalam negeri yang diakibatkan perselisihan suku.<sup>15</sup> Di samping itu timbul juga anarkisme dan ketidak disiplin Kaum Somad yang tidak dikendalikan oleh ikatan agama dan moral, sehingga hal ini menyebabkan ketidak stabilan dan kehilangan kesatuan.<sup>16</sup>

## B. Kebijakan Politik Dinasti Umayyah

---

<sup>12</sup> Ibid

<sup>13</sup> K. Ali, op.cit., hal. 218.

<sup>14</sup> Fuad Mohd. Fachruddin, op.cit., hal 39.

<sup>15</sup> Soalnya adalah soal lama, sejak masa Jahiliyyah dahulu, dimana di antara suku-suku bangsa Arabterdapat perselisihan. Persoalan seperti ini selalu exis di alam primitif. Berdasarkan fakta historis, kita juga melihat bahwa persoalan-persoalan ini pun terbawa-bawa pada permulaan Khalifah Utsman hingga wafatnya (ibid., hal. 40.)

<sup>16</sup> Syed Mahmudun Nasir, op.cit., hal. 152.

Munculnya permasalahan-permasalahan pada masa Dinasti bani Umayyah memerlukan adanya kebijaksanaan untuk mengantisipasinya. Di antara kebijaksanaan itu adalah dalam bidang politik.

Ada beberapa kebijaksanaan politik yang dilaksanakan pada masa Dinasti Umayyah, yaitu:

1. Pemindahan pusat pemerintahan dari Madinah ke Damaskus. Keputusan ini di dasarkan atas pertimbangan politis dan alasan kemauan. Karena letaknya jauh dari Kufah pusat kaum Syi'ah pendukung Ali dan jauh dari Hijaz tempat tinggal mayoritas Bani Hasyim dan Bani Umayyah, maka dapat terhindar dari konflik yang lebih tajam antara dua bani itu dalam memperoleh kekuasaan.<sup>17</sup>
2. Mu'awiyah membari penghargaan kepada orang-orang yang berjasa dalam perjuangan mencapai puncak kekuasaan seperti Amr ibn Ash, ia diangkat kembali menjadi gubernur di Mesir dan Mughirah ibn Syu'bah diangkat menjadi gubernur di wilayah Kufah.<sup>18</sup> Ia juga memperlakukan dengan baik dan mengambil hati para sahabat terkemuka yang bersikap netral terhadap berbagai kasus yang timbul waktu itu, sehingga mereka berpihak kepadanya.<sup>19</sup>
3. Menumpas orang-orang yang beroposisi yang dianggap berbahaya. Jika tidak bisa dibujuk dengan harta dan kedudukan, maka kaum pemberontak itu harus ditumpas. Ia juga menumpas kaum khawarij yang merongrong di bawah kekuasaannya dan mengkafirkannya.<sup>20</sup>
4. Membangun kekuatan militer yang terdiri dari tiga angkatan, darat, laut, dan kepolisian yang tangguh dan loyal. Mereka diberi gaji yang cukup, dua kali lebih besar dari yang diberikan Khalifah Umar ibn Khattab kepada tentaranya. Ketiga angkatan ini bertugas menjaga stabilitas keamanan dalam negeri dan memperluas wilayah kekuasaan.<sup>21</sup>
5. Meneruskan perluasan wilayah kekuasaan Islam baik ke timur maupun ke barat. Perluasan wilayah ini diteruskan oleh para penerus

---

<sup>17</sup> J. Suyuti Pulungan, op.cit., hal. 164.

<sup>18</sup> Ahmad Syalabi, op.cit., hal. 41.

<sup>19</sup> J. Suyuti Pulungan, loc.cit.

<sup>20</sup> Ibid., hal. 165.

<sup>21</sup> Ibid.

Mu'awiyah seperti Khalifah Abdul Malik ke timur, Khalifah Alwalid ke barat, dan ke Perancis pada zaman Khalifah Umar ibn Abdul Aziz. Daerah-daerah yang dikuasai umat Islam di zaman Dinasti Umayyah meliputi Spanyol, Afrika Utara, Suria, Palestina, Semenanjung Arabia, Irak, sebagian dari Asia Kecil, Persia, Afganistan, Uzbekistan, dan Kurgis (di Asia Tengah).<sup>22</sup> Sehingga dinasti ini berhasil membangun negara besar di zaman itu.<sup>23</sup> Bersatunya berbagai suku bangsa di bawah naungan Islam akan melahirkan benih-benih peradaban baru yang bercorak Islam, dan benih-benih peradaban baru itu kelak berkembang pesat di zaman Dinasti Abbasiyyah.<sup>24</sup>

6. Baik Mu'awiyah maupun penggantinya, membuat kebijaksanaan yang berbeda dari zaman Khulafaur Rasyidin. Mereka merekrut orang-orang non-muslim sebagai pejabat pemerintahan, seperti penasehat, administrator, dokter, dan kesatuan tentara. Tapi pada masa Umar ibn Abdul Aziz kebijaksanaan itu dihapuskan, karena orang-orang non-muslim (Nasrani, Yahudi, Majusi) yang memperoleh privelege di dalam pemerintahan banyak merugikan kepentingan umat Islam.<sup>25</sup> Di dalam Al-Qur'an memang terdapat pengaturan-pengaturan yang tidak membolehkan orang mukmin merekrut orang-orang non-Islam sebagai teman kepercayaan dalam mengatur orang-orang mukmin.<sup>26</sup> Tapi pada ayat lain membolehkannya.<sup>27</sup>
7. Kebijakan dan keputusan politik penting yang dibuat Khalifah Mu'awiyah adalah merubah sistem monarchi dengan mengangkat puteranya Yazid menjadi putera mahkota untuk menggantikannya

---

<sup>22</sup> Harun Nasution, *Islam Ditinjau Dari Berbagai Aspeknya I* (Jakarta: UI Press, 1974) hal. 62.

<sup>23</sup> *Ibid.*, hal.63.

<sup>24</sup> J. Suyuti Pulungan, *loc.cit.*

<sup>25</sup> *Ibid.*

<sup>26</sup> Q.S. Ali Imran/ 3: 28 dan 118.

<sup>27</sup> Q.S. AL-Mumtahanah/60 : 8.

sebagai khalifah sepeninggalnya nanti.<sup>28</sup> Hal ini sejalan dengan pendapat Jurzi Zaidan,<sup>29</sup> sebagai berikut:

Konsekuensi logis dari perubahan sistem pemerintahan tersebut adalah suksesi kepemimpinan berlangsung secara turun temurun. Dengan demikian, Mu'awiyah juga dapat dikatakan sebagai orang yang mempelopori meninggalkan tradisi di zaman khulafaur rasyidin yaitu khalifah ditetapkan berdasarkan pilihan umat. Sedangkan pada masa Dinasti Umayyah pergantian kekhalfahan ditetapkan secara turun temurun.

## **II. PERKEMBANGAN EKONOMI DAN ADMINISTRASI PADA DINASTI BANI UMAYYAH**

### **A. Perkembangan Ekonomi**

Perekonomian adalah merupakan salah satu unsur terpenting dalam memperlancar proses pembangunan suatu negara. Sebab merosotnya perekonomian suatu negara akan berpengaruh terhadap proses pelaksanaan pembangunan yang akan dilakukan .

Cari Brockelmann menegaskan bahwa:

“Pada tahun 693 khalifah Abdul Malik secara bulat menetapkan untuk mencetak uang sendiri di damaskus. Sementara itu Hajjaj pada tahun berikutnya melakukan hal yang sama. Akibatnya masyarakat Arab sudah mulai mengenal sistem perhitungan. Ide ini juga diterima di Yaman, Siria, dan Iraq.”<sup>30</sup>

Kebijakan yang dikeluarkan oleh Khalifah Abdul Malik tersebut, sangat berpengaruh terhadap perekonomian dinasti itu. Sebab kita melihat, sebelum diberlakukannya kebijakan ini mata uang yang beredar sebagai alat

---

<sup>28</sup> Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara Ajaran Sejarah dan Pemikiran* (Jakarta: UI Press, 1990) hal. 34. Lihat juga, Syed Mahmudun Nasir, *op.cit.*, hal 240.

<sup>29</sup> Jurzi Zaidan, *Tarikh al-Tamuddun al-Islami* (Beirut: Darul Maktabah Al-Hayat, 1967), hal. 356-357.

<sup>30</sup> Carl Brockelmann, *History of The Islamic Peoples* (London: Routledge, 1982) hal. 82. Nurcholis Madjid menyebut bahwa Khalifah Abdul Malik tersebut dengan gerakan Arabisasi (Nurcholish Madjid, *Islam Doktrin dan Peradaban* (Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina, 1992) hal.167. lihat juga: HarunNasution, *op.cit.*, hal. 63.

tukar adalah mata uang Roma dan mata uang Persia yaitu dirham (drachma) dan dinar (dinarius).<sup>31</sup>

Dengan tidak adanya mata uang sendiri tentu akan dapat mengurangi nilai-nilai persatuan dan kesatuan umat Islam di daerah yang demikian luasnya. Sehingga dapat dikatakan, secara implisit kebijaksanaan khalifah memiliki nilai-nilai esensial dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan umat Islam dalam wilayah yang luas tersebut.

Implikasi nilai-nilai persatuan dan kesatuan terhadap perekonomian pada masa itu (Dinasti Umayyah) adalah sangat penting. Sebab adanya persatuan dan kesatuan wilayah umat Islam yang luas tersebut akan menciptakan stabilitas keamanan yang terjamin. Dengan adanya stabilitas keamanan yang terjamin, maka lalu lintas perdagangan akan berjalan lancar, dengan lancarnya lalu lintas perdagangan, pada gilirannya akan meningkatkan perekonomiannya.

Di samping perdagangan, menurut K. Ali ada beberapa sumber pendapatan pada masa Dinasti Umayyah, yaitu: 1. *The land-tax*, 2. *The poll-tax on non-muslim subjects*, 3. *The poor rates*, 4. *Customs and excise duties*, 5. *Tributes paid under treaties*, 6. *The fifth of the spoils of war*, 7. *Fay*, 8. *Additional imports in kinds*, 9. *Presents on occasions of festival etc*, and 10. *Child tribute from the barbers*.<sup>32</sup>

Seluruh sumber-sumber pendapatan tersebut di atas dikelola oleh sebuah departemen yang disebut dengan departemen pendapatan negara (diwan al-kharaj), dan hasil pengumpulan dari sumber-sumber tersebut disimpan di Baitul Mal (kantor perbendaharaan negara).<sup>33</sup>

Pada masa pemerintahan Abdul Malik, perkembangan perdagangan dan perekonomian, teraturnya pengelolaan pendapatan negara yang didukung oleh keamanan dan ketertiban yang terjamin telah membawa masyarakatnya pada tingkat kemakmuran. Realisasinya dapat kita lihat dari hasil penerimaan pajak (kharaj) di wilayah syam saja, tercatat 1.730.000 dinar emas setahun.<sup>34</sup> Hal ini seperti yang dikatakan oleh Hugh Kennedy: “Nor

---

<sup>31</sup> Joesoef Sou'yb, Sejarah daulah Umayyah I (Jakarta: Bulan Bintang, 1977) hal.104.

<sup>32</sup> K. Ali, op.cit., hal. 213.

<sup>33</sup> J. Suyuthi Pulungan, op.cit., hal. 170.

<sup>34</sup> Joesoef Sou'yb, op.cit., hal 106.

was there any doubt that the surplus taxation was to be forwarded to the treasury in Damascus.<sup>35</sup>

Kemakmuran masyarakat Bani Umayyah juga terlihat pada masa pemerintahan Umar ibn Abdul Aziz. Keadaan perekonomian pada masa pemerintahannya telah naik ke taraf yang menakjubkan. Semua literatur yang ada pada kita sekarang ini menguatkan bahwa kemiskinan, kemelaratan, dan kepapaan telah dapat diatasi pada masa pemerintahan khalifah ini.<sup>36</sup> Kebijakan yang dilakukan oleh Umar ibn Abdul Aziz dalam implikasinya dengan perekonomian yaitu membuat aturan-aturan mengenai takaran dan timbangan, dengan tujuan agar dapat membasmi pemalsuan dan kecurangan dalam pemakaian alat-alat tersebut.<sup>37</sup>

Bertitik tolak dari uraian di atas dapatlah dikatakan perkembangan perekonomian pada masa pemerintahan Dinasti Umayyah secara umum sudah mulai meningkat dibanding dengan masa sebelumnya. Meningkatnya perekonomian yang membawa kepada kemakmuran rakyat pada dinasti ini, sebenarnya tidak terlepas dari kebijaksanaan-kebijaksanaan yang dilakukan khalifah, di samping dukungan masyarakat terhadap kebijaksanaan-kebijaksanaan tersebut.

## B. Perkembangan Administrasi

Pada masa pemerintahan khalifah rasyidin (632-661 M), pimpinan pemerintahan pusat hanya terdiri atas khalifah, didampingi seorang pejabat yang disebut al-Katib (sekretaris). Di samping khalifah ada majelis penasihat yang terdiri atas sahabat-sahabat Nabi Muhammad.<sup>38</sup> Al-Katib bertugas mencatat penerimaan dan pengeluaran perbendaharaan negara. Mengurus surat menyurat dengan pembesar setempat, mendata nama-nama tentara dan penghasilannya.<sup>39</sup>

Pada masa Dinasti Bani Umayyah, telah muncul persoalan-persoalan yang cenderung membawa ketidak stabilan dan perpecahan umat, seperti

---

<sup>35</sup> Hugh Kennedy, *The Prophet and The Age of The Chaliphate* (London and New York: Longman, 1991) hal.98.

<sup>36</sup> Ahmad Syalabi, *op.cit.*, hal.88.

<sup>37</sup> *Ibid.*, hal.87.

<sup>38</sup> Joesoef Sou'yb, *op.cit.*, hal. 233.

<sup>39</sup> *Ibid.*

hancurnya teokrasi yang telah mempersatukan kekhalifahan yang lebih dulu, munculnya anarkisme dan ketidak disiplinian kaum nomad.<sup>40</sup> Di sisi lain wilayah kekuasaan umat Islam pada masa Dinasti Umayyah, menurut Annemarie Schimel: “Telah sampai ke Atlantic, perbatasan Bizantium, Selat Gibraltar, (Jabal Tarik) tahun 711. Pada tahun itu juga mereka juga menguasai Transoxiana, Sind, serta Indusvalley (sekarang arah selatan Pakistan).<sup>41</sup>

Adanya persoalan intern dan ekstern tersebut di atas mengakibatkan terjadinya perkembangan administrasi pemerintahan sesuai dengan perkembangan wilayah dan perkembangan urusan kenegaraan yang semakin lama semakin kompleks.

Pengelolaan administrasi dalam struktur pemerintahan Dinasti Bani Umayyah adalah merupakan penyempurnaan dari pemerintahan khulafaur rasyidin yang diciptakan oleh Khalifah Umar. Wilayah kekuasaan yang luas itu, sebagaimana periode Madinah dibagi menjadi wilayah provinsi. Setiap provinsi dikepalai oleh seorang gubernur atau amir yang diangkat oleh khalifah. Gubernur didampingi seseorang atau beberapa orang katib (sekretaris), seorang hajib (pengawal), dan pejabat-pejabat penting lain, yaitu shahib al-kharaj (pejabat pendapatan), shahib al-syurthat (pejabat kepolisian), dan qadhi (kepala keagamaan dan hakim). Pejabat pendapatan dan qadhi diangkat oleh khalifah dan bertanggung jawab kepadanya.<sup>42</sup>

Pada tingkat pemerintahan pusat dibentuk beberapa lembaga dan departemen, al-katib, al-hajib, dan diwan. Lembaga al-katib terdiri dari katib al-rasail (sekretaris negara), katib al-kharaj (sekretaris pendapatan negara), katib al-jund (sekretaris militer), katib al-syurthat (sekretaris kepolisian), katib al-qadhi (panitera).<sup>43</sup>

Para katib bertugas mengurus administrasi negara secara baik dan rapi untuk mewujudkan kemaslahatan negara. Al-hajib (pengawal dan kepala rumah tangga istana) bertugas mengatur para pejabat atau siapapun yang bertemu dengan khalifah. Lembaga ini belum dikenal di zaman negara

---

<sup>40</sup> Syed Mahmudun Nasir, *op.cit.*, hal. 152.

<sup>41</sup> Annemarie Schimel, *Islam An Introduction*, (New York: University of New York Press, 1992) hal. 20-21.

<sup>42</sup> J. Suyuthi Pulungan, *op.cit.*, hal. 168.

<sup>43</sup> *Ibid.* Bandingkan dengan Joesoef Sou'yb, *op.cit.*, hal. 234-235.

Madinah, karena siapa saja boleh bertemu dan berbicara langsung dengan khalifah tanpa melalui birokrasi.<sup>44</sup> Tapi ada tiga orang yang boleh langsung bertemu dengan khalifah tanpa hajib, yaitu muazin untuk memberi tahukan waktu shalat pada khalifah, shahib al-barid (pejabat pos) yang membawa berita-berita penting untuk khalifah, dan shahib al-tha'am, petugas yang mengurus hal ikhwal makanan dalam istana.<sup>45</sup>

Dalam bidang pelaksanaan hukum yaitu *al-Nidzam al-Qadhai* terdiri dari tiga bagian, yaitu al-qadha dipimpin seorang qadhi yang bertugas membuat fatwa-fatwa hukum dan membuat peraturan-peraturan yang digali langsung dalam al-Qur'an, sunnah Rasul, Ijma', atau berdasarkan ijtihad. Badan ini bebas dari pengaruh penguasa dalam menetapkan keputusan hukum, baik terhadap pejabat atau pagawai negara yang melakukan pelanggaran. Pejabat badan al-Hisbat disebut al-Muhtasib, tugasnya menangani kriminal yang perlu penyelesaian segera. Sedang pejabat al-Mazhalim disebut qadhi al-mazhalim atau shahib al-mazhalim. Kedudukan badan ini lebih tinggi dari al-qadha dan al-hisbat, karena badan ini bertugas meninjau kembali akan kebenaran dan keadilan keputusan-keputusan hukum yang dibuat oleh qadhi dan muhtasib.<sup>46</sup>

Jika terjadi kasus tentang perkara yang keputusannya dianggap perlu ditinjau kembali, baik rakyat maupun pejabat yang menyalah gunakan jabatan, badan ini menyelenggarakan mahkamah al-mazhalim yang mengambil tempat di masjid. Sidang ini dihadiri oleh lima unsur lengkap yaitu para pembantu sebagai juri, para hakim, para fuqaha, para katib, dan para saksi.<sup>47</sup>

Di dalam tubuh pemerintahan Bani Umayyah terdapat beberapa diwan atau departemen yaitu:

1. Diwan al-Rasail, departemen yang mengurus surat-surat negara dari khalifah kepada gubernur atau menerima surat-surat dari gubernur.<sup>48</sup> Departemen ini memiliki dua sekretariat, untuk pusat

---

<sup>44</sup> J. Suyuthi Pulungan, loc.cit.

<sup>45</sup> Ibid., lihat juga, Joesoef Sou'yb, op.cit., hal. 236.

<sup>46</sup> J. Suyuthi Pulungan, op.cit., hal. 169.

<sup>47</sup> Ibid.

<sup>48</sup> Ibid, hal. 170. Lihat juga, Hasan Ibrahim Hasan, Tarikh Islam (Mesir: Maktabah Nahdhah, 1974) hal. 458.

menggunakan bahasa Arab, dan daerah menggunakan bahasa Yunani dan bahasa Persia.<sup>49</sup>

Philip K. Hitti mengatakan bahwa:

*The Arabization in changing the language of the public registers (diwan) from Greek to arabic in Damascus and from Pahlavi to Arabic in Al-Iraq and Easten provinces and in the creation of an Arabic coinage with the charge in personal naturally took place.*<sup>50</sup>

Berdasarkan kepada pendapat Philip K. Hitti di atas, menunjukkan bahwa pada masa pemerintahan Abdul Malik telah diterapkan peraturan gerakan Arabisasi yaitu dengan hanya menggunakan bahasa Arab dalam penulisan surat-surat negara.<sup>51</sup> bahkan pengaruh gerakan Arabisasi masih terlihat hingga sekarang, sebagaimana yang dikemukakan oleh M.A. Shaban: *“this was most evident from the fact that the language of public record, which until then had been copric, Greek, or Pahlavi change to Arabic.*<sup>52</sup>

2. Diwan al-Khatim, departemen pencatatan yang bertugas menyalin dan meregistrasi semua keputusan khalifah atau oeraturan-peraturan pemerintah untuk dikirim pada pemerintah daerah.<sup>53</sup>
3. Diwan al-Kharaj, departemen pendapatan negara yang diperoleh dari kharaj, zakat, ghanimah, dan sunmber-sumber lain. Semua pwmasukan dari sumber-sumber itu disimpan di Baitul Mal.<sup>54</sup>
4. Diwan al-Barid, departemen pelayanan pos, bertugas malayani informasi tentang berita-berita penting dari daerah kepada pemerintah pusat dan sebaliknya. Pelayanan ini sudah diperkenalkan pada masa Mu’awiyah.<sup>55</sup>

---

<sup>49</sup> Syed Mahmudun Nasir, op.cit., hal. 153.

<sup>50</sup> Philip K. Hitti, op.cit., hal 217.

<sup>51</sup> J. Suyuthi Pulungan, loc.cit.

<sup>52</sup> M.A. Shaban, Islamic History A New Interpretation I (London; Cambridge University Press, 1976) hal. 114.

<sup>53</sup> W. Montgomery Watt, The Majesty That Was Islam (London: Singwich and Jackson, 1976) hal. 51. Lihat juga, K. Ali, op.cit., hal 212. Hasan Ibrahim Hasan, loc.cit.

<sup>54</sup> J. Suyuthi Pulungan, loc.cit., lihat Syed Mahmudun Nasir, loc.cit.

<sup>55</sup> Ibid. Lihat juga, W. Montgomery Watt, loc.cit.

5. Diwan al-Jund, departemen pertahanan yang bertugas mengorganisir militer.<sup>56</sup>

Berangkat dari uraian di atas, terlihat bahwa perkembangan administrasi pada masa Dinasti Bani Umayyah sudah semakin kompleks, mengingat munculnya berbagai persoalan yang crucial yang menuntut adanya kebijaksanaan-kebijaksanaan. Namun secara prinsip kebijaksanaan yang dilakukan Bani Umayyah adalah merupakan pengembangan dan penyempurnaan dari administrasi yang pernah diciptakan oleh Khalifah Umar ibn Khattab.

## **BANI ABBASIYAH**

### **ABBASIYAH: PERKEMBANGAN POLITIK, EKONOMI, DAN ADMINISTRASI**

Sejarah telah mengukir, bahwa pada masa pemerintahan Daulah Abbasiyyah, umat Islam benar-benar berada di pucuk kejayaan dan memimpin peradaban dunia saat itu. Von Grunebaum, misalnya, dalam bukunya "Classical Islam", menggambarkan masa pemerintahan Bani Abbasiyyah merupakan "*golden age*" (masa kejayaan dan keemasan) dalam sejarah perjalanan peradaban Islam, terutama pada masa Khalifah Harun al-Rasyid dan al-Ma'mun.<sup>57</sup> Begitu juga Jurji Zaidan, menggambarkan hal yang sama, bahwa Daulah Abbasiyyah merupakan zaman di mana kedaulatan umat Islam telah sampai pada puncak kemuliaan, baik kekayaan, kemajuan ataupun kekuasaan. Pada zaman inilah telah lahir berbagai ilmu pengetahuan Islam, seperti filsafat, astronomi, kedokteran, fisika, matematika, dan sebagainya, dan juga telah diterjemahkan ilmu-ilmu penting ke dalam Bahasa Arab.<sup>58</sup>

---

<sup>56</sup> K. Ali, loc.cit., J. Suyuthi Pulungan, op.cit., hal 171. Lihat juga, W. Montgomery watt, loc.cit.

<sup>57</sup> G.E. Von Grunebaum, Classical Islam, George Allan & Unwin LTD., 1970, hal. 90.

<sup>58</sup> Jurji Zaidan, History of Islam Civilization, New Delhi: Kitab Bhavan: 1978, hal. 231.

## A. Abbasiyyah : Perkembangan Politik

Daulah Abbasiyyah berkuasa kurang lebih selama lima abad, yaitu mulai tahun 132 H/750 M – 656H/1258 M. untuk mempermudah dalam menganalisa perkembangan politikselama pemerintahan yang panjang tersebut, perlu dibuat peta periodisasi perjalanan politik selama pemerintahan Abasiyyah. Periode I: masa antara tahun 132 H/ 750 M – 334 H/945 M, yaitu mulai pamarintahan Abu Abbas sampai al-Mustakfi. Periode II: masa antara tahun 334 H/945 M – 656 H/1258 M, yaitu masa al-Muti' sampai al-Musta'sim.<sup>59</sup> Pembagian periodisasi ini diasumsikan bahwa pada periode I, perkembanga di berbagai bidang masih menunjukkan grafik vertikal, stabil, dan dinamis. Sedang dalam periode II, kejayaan terus merosot sampai datangnya pasukan Tartar yang berhasil menghancurkan Daulah Abbasiyyah.

### 1. Perkembangan Politik Abbasiyyah Periode I

Pada masa pemerintahan Abbasiyyah I ini, kebijakan-kebijakan politik yang dikembangkan antara lain:

Pertama, memindahkan ibu kota negara. Langkah awal yang diambil al-Saffah adalah memindahkan ibu kota negara dari Damaskus (yang dahulu ibu kota Umayyah) dipindahkan ke Baghdad.<sup>60</sup> Alasan pemindahan ibu kota negara ini untuk menghindari situasi yang tidak menentu baik di Damaskus maupun di Kufah yang masih kelihatan plin-plan.<sup>61</sup> Dengan dipindahkannya ibu kota negara ini, diasumsikan roda pemerintahan akan berjalan dengan lancar dan cepat maju, di samping secara geografis letaknya amat strategis, karena Baghdad yang bekas wilayah kekuasaan Persia waktu itu sudah menjadi basisnya pemimpin-pemimpin besar, sarjana, dan filosof-filosof besar, semanjak terjadinya kontak dengan Mesir dan Romawi.<sup>62</sup>

---

<sup>59</sup> Kerangka tersebut diambil dari J.H. Kramers (Ed.), *Enciclopedi of Islam*, Netherlands, E.J. Brill, Leiden, hal. 17.

<sup>60</sup> Carl Brockelmann, *History of Islamic Peoples*, London: Routledge and Kegan Paul and Henley, 1982, hal. 109. Lihat juga, misalnya, M. Lombard, *The Golden Age of Islam*, New York, North Holland Publishing Company, 1975, hal. 124.

<sup>61</sup> Syed Mahmudunnasir, *Islam Its Concepts and History*, New Delhi: Kitab Bhavan, 1981, hal. 187-8.

<sup>62</sup> Lihat, Jurji Zaidan, *op.cit.*, hal. 161.

Kedua, memusnahkan keturunan Bani Umayyah.<sup>63</sup> Menurut Syed Mahmudunnasir, al-Saffah dalam menerapkan kebijakan pemusnahan anggota keluarga Umayyah dengan jalan yang kejam dan licik. Pada suatu ketika, al-Saffah mengundang 90 orang keluarga Umayyah untuk suatu upacara, tapi kemudian membunuh mereka secara kejam dan curang. Agen-agen dan mata-mata al-Saffah menjelajahi seluruh imperium untuk memburu para pelarian keluarga Umayyah. Salah satu di antaranya ada yang berhasil lolos dari pembunuhan massal yaitu Abd al-Rahman, seorang cucu Hisyam. Ia kemudian berhasil mendirikan pemerintahan Bani Umayyah yang gemilang di Spanyol.<sup>64</sup> Tindakan politik ini diambil untuk menjaga kemungkinan timbul lagi gerakan pemberontakan dari keluarga Umayyah.

Ketiga, merangkul orang-orang Persia. Dalam rangka politik memperkuat diri, Abbasiyyah memberi peluang dan kesempatan yang besar kepada kaum Mawali<sup>65</sup> keturunan Persia dalam berbagai bidang pemerintahan. Demikian rupa dalam mengutamakan orang-orang Persia, sehingga terkesan mereka diletakkan atas orang Arab. Bahkan selama kurun waktu pemerintahan empat khalifah, mulailah al-Mansur sampai tiga sesudahnya, terdapat satu keluarga yang sangat berpengaruh dan memainkan peran utama dalam pemerintahan.<sup>66</sup> Ia adalah keluarga Barmakid

---

<sup>63</sup> Lihat Jurji Zaidan, *op.cit.*, hal. 1156. Carl Brockelmann, *op.cit.*, hal. 114.

<sup>64</sup> Syed Mahmudunnasir, *op.cit.*, hal. 187.

<sup>65</sup> Mawali: asal mula mawali yaitu budak-budak tawanan perang yang telah dimerdekakan. Kemudian istilah ini berkembang menjadi semua orang Islam yang bukan bangsa Arab disebut Mawali, sebagai ejekan. Latar belakang istilah ini muncul pada masa Umayyah yang telah mengetrapkan semacam "politik kasta". Politik kasta ini muncul karena ingin membangkitkan lagi semangat fanatisme Arab atau lebih khusus lagi "fanatisme Quraisy" yang telah lama terhapus sejak kedatangan Islam sampai masa pemerintahan Khulafa al-Rasyidi. Sebagai dampak dari politik kasta yang dijalankan Umayyah, maka egoisme Arab semakin tinggi, terutama sikap mereka terhadap umat Islam non-Arab. Demikian congkaknya sampai memuncak pada sebutan al-Hamra (si merah) untuk kaum Mawali. Sedangkan orang Arab memandang dirinya sebagai sayyid (tuan), seakan-akan mereka dijadikan Tuhan untuk memerintah. Pada masa Abbasiyyah "politik kasta" ini dihapus total dan diganti dengan politik egalitarianisme.

<sup>66</sup> Lihat Hamilton, A.R. Gibb, *Studies on The Civilization of Islam*, Kanada: Sounders of Toronto LTD, 1968, hal. 69-70.

(Barmakiah)<sup>67</sup> yang kepala keluarganya ialah Khalid ibn Barmak.<sup>68</sup> Khalid diangkat menjadi wazir oleh al-Mansur dan keturunannya memegang kedudukan itu di bawah khalifah-khalifah selanjutnya. Keluarga Barmakid semuanya terkenal orang-orang yang cerdas dan pandai.<sup>69</sup>

Keempat, menumpas pemberontakan-pemberontakan. Pada awal berdirinya Abbasiyyah banyak timbul pemberontakan pada hampir seluruh pelosok negeri. Pemberontakan-pemberontakan yang menggoncangkan stabilitas pemerintahan Abbasiyyah tersebut, antara lain: Pemberontakan Abdullah (paman al-mansur yang menjadi gubernur di Syiria), pemberontakan Sanfad (penuntut balas kematian Abu Muslim al-Khurasani, Gubernur Khurasan), pemberontakan Rawandiyah, pemberontakan Muhammad ibn Ibrahim (keturunan Khalifah Ali),<sup>70</sup> pemberontakan kaum Khajar di Mesopotamia, pemberontakan Khawarij, dan lain sebagainya.

Kelima, menghapus politik kasta. Ciri-ciri yang menonjol dari revolusi Abbasiyyah ialah munculnya negara Islam yang berbeda dengan Daulah Umayyah, yang di dalamnya semua unsur penduduk memperoleh hak yang sama dalam kekuasaan. Perlakuan demokrasi tentang persamaan dan persaudaraan manusia, benar-benar mendapat perhatian yang serius. Pengetrapan politik persamaan ras ini, mendorong Abbasiyyah membangun suatu struktur yang berlangsung tanpa persaingan selama lebih dari lima abad.<sup>71</sup> Philip K. Hitti mengatakan, bahwa pemerintahan yang dibangun oleh Abbasiyyah lebih bersifat internasional dan menjadi wilayah neo-muslim di mana bangsa Arab menjadi satu bagian dari ras-ras yang ada.<sup>72</sup>

---

<sup>67</sup> Keluarga Barmak sebelum menganut Islam adalah keluarga bangsawan Persia yang beragama Budha. Sebenarnya ia mulai diangkat menjadi menteri semenjak al-Saffah, hanya saja ia belum diberi peranan yang cukup luas dibanding seperti pada masa al-Mansur. Keterangan lebih lengkap baca: Carl Brockelmann, op.cit., hal. 114: Kramers (Ed.), op.cit., hal. 17.

<sup>68</sup> Jurji Zaidan, op.cit., hal. 164.

<sup>69</sup> Mahmudunnasir, op.cit., hal. 191.

<sup>70</sup> Lihat Hasan Ibrahim Hasan, Tarikh Islam, Kairo: Maktabah al-Nahdhah al-Mishriyyah, jilid II, 1976, hal. 121-124.

<sup>71</sup> Mahmudunnasir, op.cit., hal. 186-7.

<sup>72</sup> "In one respect there where was fundamental difference: The Umayyah empire was Arab, The Abbasid was more international. The Abbasid was an empire of neo muslim

Keenam, kebijakan luar negeri. Dalam melaksanakan politik luar negerinya, Abbasiyyah menjalin hubungan yang erat dengan Kaisar Charlemagne (Charles) yang berkuasa di Barat.<sup>73</sup> Abad kesembilan ditandai dengan adanya dua raja adikuasa, yaitu Charles di Barat dan Harun di Timur. Di antara kedua raja itu, Harun tidak diragkan lagi merupakan raja yang paling berkuasa dan mencerminkan kebudayaan yang tinggi. Kedua raja besar itu menjalin hubungan diplomasi luar negerinya yang didorong oleh kepentingan masing-masing. Charles berharap pada Harun untuk menghadapi Bizantium, yang juga bermusuhan dengan Harun. Sementara Harun menginginkan persahabatan dengan Charles untuk menghadapi saingan dan musuhnya yang sangat berbahaya, yaitu Dinasti Umayyah di Spanyol yang juga menjadi seteru Charles. Persahabatan saling menguntungkan ini berwujud sampai pada tingkat pertukaran data besar dan saling memberi hadiah.<sup>74</sup> Sebagai realisasi dari kebijakan politik luar negeri ini, pada masa Khalifah al-Mahdi (775-785 M) dibuka kembali ekspansi ke Bizantium dengan sebuah misi “perang suci” (*Holy War*).<sup>75</sup>

Selain kebijakan-kebijakan di atas, langkah-langkah yang diambil dalam program politiknya adalah: 1) para khalifah tetap dari Arab, sementara para menteri, gubernur, panglima perang, dan pengawal lainnya banyak diangkat dari golongan Mawali turunan Persia. 2) kota Baghdad ditetapkan sebagai ibu kota negara, dan menjadi pusat kegiatan politik, ekonomi, sosial, dan kebudayaan, dijadikan kota “pintu terbuka”. 3) para khalifah harus mendukung terhadap usaha-usaha memajukan ilmu pengetahuan. 4) kebebasan berpikir dan kebebasan berpendapat mendapat porsi yang tinggi, sehingga masyarakat terhindar dari kaqlid.<sup>76</sup> 5) para pejabat istana dan kaum ulama wajib mengakui tentang “haqq al-Qur’an”, untuk itu maka dilaksanakan mihnah.<sup>77</sup>

---

in which the Arab formed only one of the many componen races”; lebih lanjut baca: Philip K. Hitti, *op.cit.*, hal. 289.

<sup>73</sup> Charlemagne, juga sering disebut dengan Charles (karel) yang agung, Raja Franka yang kelak kemudian menjadi kaisar Romawi.

<sup>74</sup> Lihat Philip K. Hitti, *op.cit.*, hal. 298. Mahmudunnasir, *op.cit.*, hal.195.

<sup>75</sup> Lihat Philip K. Hitti, *op.cit.*, hal. 199. Mahmudunnasir, *op.cit.*, hal 193.

<sup>76</sup> A. Hasjmy, *op.cit.*, hal. 213-4.

<sup>77</sup> Von Grunebaum, *op.cit.*, hal 94. Mahmudunnasir, *op.cit.*, hal 204-5.

## 2. Perkembangan Politik Abbasiyyah II

Dalam periode II ini, kekuasaan politik Abbasiyyah mulai menurun dan terus menurun, terutama kekuasaan politik pusat. Karena negara-negara bagian sudah tidak begitu mempedulikan lagi dengan pemerintahan pusat, kecuali pengakuan secara politis saja. Kekuasaan militer pusat pun mulai berkurang pengaruhnya, sebab masing-masing panglima di daerah-daerah sudah berkuasa sendiri, bahkan pemerintahan daerah pun telah membentuk tentara sendiri.

Wilayah-wilayah kekuasaan Abbasiyyah secara politis sudah mulai cerai berai. Ikatan-ikatan mulai putus satu per satu antara wilayah-wilayah Islam. Di wilayah Barat, Andalusia, Bani Umayyah telah bangkit lagi dengan mengangkat Abd al-Rahman Nasir menjadi Amir al-Mu'minin. Di Afrika Utara, Syi'ah Ismailiyyah bangkit dan membentuk Daulah Fatimiyyah,<sup>78</sup> dengan mengangkat Ubaidullah al-Mahdi menjadi khalifah dan kota madiyah dekat Tunisia dijadikan pusat kerajaan. Di Mesir, Muhammad Ikhsyad berkuasa atas nama Bani Abbas, demikian pula di Halan dan Musil Bani Hamdan bangkit. Sementara di Yaman, kedudukan Syi'ah semakin kokoh, sedangkan di ibu kota Baghdad, Bani Buwaihi berkuasa dalam prektek (defacto) dan Bani Abbas tinggal nama saja. Sedangkan di wilayah bagian timur, Daulah Samawiyah yang berkedudukan di Bukhara berpengaruh besar. Dalam keadaan yang penuh kekacauan dan berkeping-keping inilah datang pasukan Hulako Khan dengan tentara Tartarnya menghancurkan Baghdad, dan sampai di sini berakhir Daulah Abbasiyyah.<sup>79</sup>

### B. Abbasiyyah: Perkembangan Ekonomi

Sektor pembangunan di bidang ekonomi merupakan masalah sentral dalam pembangunan suatu negara. Ia dapat dikatakan sebagai tulang punggung atau bahkan jantung dari kehidupan suatu negara. Tanpa didukung oleh ekonomi yang kuat, mustahil suatu negara dapat melaksanakan pembangunan-pembangunan di bidang yang lain secara baik dan sempurna.

---

<sup>78</sup> Kramers, op.cit., hal., 20.

<sup>79</sup> Kramers (Ed.), op.cit., hal. 21. A. Hasjmy, op.cit., hal. 215.

Dalam masa permulaan pemerintahan Bani Abbasiyyah, pertumbuhan ekonomi (economic growth) dikatakan cukup stabil dan menunjukkan angka vertikal. Devism negara penuh berlimpah-limpah, uang masuk lebih banyak dari pada pengeluaran. Kue nasional membengkak melebihi dari anggaran belanja negara. Khalifah al-Mansur merupakan tokoh ekonom Abbasiyyah yang telah mampu meletakkan dasar-dasar yang kuat dalam bidang ekonomi dan keuangan negara. Keutamaan al-Mansur dalam menguatkan dasar Daulah Abbasiyyah dengan ketajaman pikiran, disiplin, dan adil adalah sama halnya dengan Khalifah Umar ibn Khattab dalam menguatkan Islam.

Pada waktu khalifah al-Mansur meninggal dunia setelah memerintah selama 22 tahun, dalam kas negara tersisa kekayaan negara sebanyak 810.000.000 dirham. Sedangkan pada Khalifah harun al-Rasyid meninggalkan kekayaan negara sebanyak 900.000.000 dirham. Kecakapan Harun dalam menggunakan anggaran belanja negara sama dengan al-Mansur, hanya saja Harun lebih banyak mengeluarkan dibanding dengan al-Mansur, mungkin karena tuntutan zaman yang berbeda.<sup>80</sup>

Pada masa permulaan Abbasiyyah, semua khalifah menaruh perhatian besar terhadap perkembangan ekonomi dan keuangan negara. Sektor-sektor perekonomian yang dikembangkan meliputi pertanian, perindustrian, dan perdagangan.

#### 1. Sektor Pertanian

Di sektor pertanian, usaha-usaha yang dilakukannya antara lain: 1) memperlakukan ahl zimmah dan mawali dengan perlakuan baik dan adil, serta menjamin hak milik dan jiwa mereka, hingga kembalilah mereka bertani di seluruh penjuru negeri. 2) mengambil tindakan keras terhadap para pejabat yang berlaku kejam kepada para petani. 3) memperluas daerah-daerah di segenap wilayah negara. 4) membangun dan mentempurnakan sarana perhubungan ke daerah-daerah pertanian, baik darat maupun air. 5) membangun bendungan-bendungan dan menggali kanal-kanal baik besar maupun kecil, sehingga tidak ada daerah pertanian yang tidak terjangkau irigasi.<sup>81</sup> Dengan langkah seperti itu,

---

<sup>80</sup> A. Hasjmy, op.cit., hal. 239.

<sup>81</sup> A. Hasjmy, op.cit., hal. 239-40

maka pertanian menjadi maju pesat, tidak saja di tanah Iraq yang tanahnya terkenal subur, tapi juga di seantero negeri. Tiap-tiap wilayah mempunyai kekhususan dalam menghasilkan pertanian.

## 2. Sektor Perindustrian

Pada masa Abbasiyyah dibangun tempat-tempat perindustrian hampir meliputi seluruh wilayah tanah air. Perindustrian terbesar dari sektor pertambangan yang meliputi: tambang perak, tembaga, seng, dan besi yang dihasilkan dari tambang-tambang di Persia dan Khurasan. Dekat Beirut terdapat beberapa tambang besi, seperti halnya marmer di Tibris, dan sebagainya. Juga di Asia barat terdapat pabrik-pabrik, seperti pabrik permadani, sutera, katun, wol, brokat (baju perempuan), sofa, dan lain-lain.<sup>82</sup>

Dengan banyaknya dibangun tempat-tempat industri, maka terkenallah, misalnya: Bashrah, terkenal dengan industri sabun dan gelas; Kufah dengan industri sutera; Khuzastan, dengan tekstil sutera bersulam; Damaskus, dengan kemeja sutera; Khurasan, dengan selendang, wol, emas, dan peraknya; Syam, dengan keramik dan gelas berwarna; Andalusia, dengan kapal, kulit, dan senjata;<sup>83</sup> Baghdad sebagai ibu kota negara memiliki berbagai macam tempat industri. Dalam catatan sejarah, Baghdad mempunyai lebih 100 kincir air, 4000 pabrik gelas, 30.000 kilang keramik. Di samping itu, Baghdad mempunyai industri-industri khusus barang-barang mewah (lux) baik gelas, tekstil, keramik, dan sebagainya. Di kota Baghdad diadakan pasar-pasar khusus untuk macam-macam hasil produksi, seperti pasar besi, pasar kayu jati, pasar keramik, pasar tekstil, dan sebagainya.<sup>84</sup>

## 3. Sektor Perdagangan

Kota Baghdad, di samping sebagai kota politik, kota agama, kota kebudayaan, juga merupakan “kota perdagangan” yang terbesar di dunia saat itu. Sedangkan kota Damaskus merupakan kota dagang nomor dua, sebagai pusat kota perdagangan transit bagi kafilah-kafilah

---

<sup>82</sup> Philip K. Hitti, *op.cit.*, hal. 345.

<sup>83</sup> Philip K. Hitti, *op.cit.*, hal. 345-48.

<sup>84</sup> A. Hasjmy, *op.cit.*, hal 240-1.

dagang dari Asia Kecil, dan daerah-daerah Furat yang menuju negeri-negeri Arab dan Mesir atau sebaliknya.

Sungai Tigris dan Furat menjadi pelabuhan transmisi bagi kapal-kapal dagang dari berbagai penjuru dunia. Terjadinya kontak perdagangan tingkat internasional ini semenjak Khalifah al-Mansur.<sup>85</sup> Kecuali Baghdad dan Damaskus, juga terkenal sebagai kota dagang adalah Bashrah, Kufah, Madinah, Kairo, dan kota-kota di Persia. Kapal-kapal dagang Arab Islam telah sampai ke Ceylon, Bombai, Malaka, pelabuhan-pelabuhan di Indocina, tiongkok, dan India.<sup>86</sup> Pada waktu itu terjadilah hubungan dagang antara kota-kota dagang Islam dengan kota-kota dagang di seluruh penjuru dunia.

Untuk menghindari terjadinya kolusi dan penyelewengan dalam sektor perdagangan, Khalifah Harun membentuk satu badan khusus yang bertugas mengawasi pasaran dagang, mengatur ukuran timbangan, menentukan harga pasaran, atau dengan kata lain mengatur politik harga.<sup>87</sup>

### **C. Abbasiyyah: Perkembangan Adminstrasi**

Dalam bidang administrasi negara, masa Daulah Abbasiyyah tidak jauh berbeda dengan masa Umayyah. Hanya saja, pada masa ini telah mengalami kemajuan-kemajuan, perbaikan, dan penyempurnaan.

Secara umum, menurut Philip K. Hitti, krdali pemerintahan dipegang oleh khalifah sendiri. Sementara dalam operasinya, yang menyangkut urusan sipil dipegang oleh wazir (menteri), masalah hukum diserahkan kepada qadi (hakim), dan masalah militer dipegang oleh amir ( jenderal).<sup>88</sup> Sistem pemerintahan Abbasiyyah bersifat sentralisasi. Dalam kesadaan darurat, sering khalifah menyerahkan pemerintahan kepada panglima besar angkatan perang, dan diberi gelar 'Amiru al-Umara'.<sup>89</sup>

Adapun menteri-menteri departemen tersebut terdiri dari:

---

<sup>85</sup> Philip K. Hitti, op.cit., hal. 343.

<sup>86</sup> Philip K. Hitti., op.cit., hal. 343.

<sup>87</sup> A. Hasjmy, op.cit., hal. 241-2.

<sup>88</sup> Philip K. Hitti, op.cit., hal. 317.

<sup>89</sup> Jurji Zaidan, op.cit., hal. 227. Kramers, op.cit., hal. 20.

1. Diwan al-Kharaj (departemen keuangan)
2. Diwan al-Diyah (departemen kehakiman)
3. Diwan al-Zimam (departemen pengawasan urusan-urusan negara)
4. Diwan al-Jund (departemen ketentaraan)
5. Diwan al-Mawali wa al-Ghilman (departemen perburuan)
6. Diwan al-Barid (departemen post dan telekomunikasi)
7. Diwan al-Ziman wa al-Nafakat (departemen pengawasan keuangan)
8. Diwan al-Rasail (departemen urusan arsip)
9. Diwan al-Toukia (departemen permohonan)
10. Diwan al-Nazr fi al-Mazalim (departemen pembelaan rakyat tertindas)
11. Diwan al-Ahdas wa al-Shurta (departemen keamanan dan kepolisian)
12. Diwan al-‘Ata (departemen sosial)
13. Diwan al-Akhsyam (departemen keluarga dan wanita)
14. Diwan al-Akarah (departemen pekerjaan umum dan tenaga kerja)<sup>90</sup>

## **KESIMPULAN**

Dalam mempelajari sejarah selain diperlukan kemampuan untuk menangkap “coding” (kode) atau simbol-simbol yang nampak dari luar, juga yang lebih penting kemampuan dalam menangkap sesuatu yang berada di balik kode tersebut yaitu muatan yang terkandung dalam “decoding”nya.

Menyimak uraian di atas, ternyata perkembangan ekonomi pada masa Dinasti Bani Umayyah sudah mulai meningkat dibanding dengan masa sebelumnya. Peningkatan perekonomian yang pada gilirannya akan membawa kemakmuran pada dinasti ini, pada dasarnya tidak terlepas dari kebijaksanaan-kebijaksanaan yang diterapkan para khalifah, disamping partisipasi dan dukungan masyarakat terhadap kebijaksanaan-kebijaksanaan tersebut.

---

<sup>90</sup> Philip K. Hitti, op.cit., hal. 319. Ameer Ali, op.cit., hal. 284. A. Hasjmy, op.cit., hal. 230-1.

Sedangkan perkembangan dalam bidang administrasi pada Dinasti Bani Umayyah sudah semakin kompleks. Namun secara prinsip perkembangan dan kebijaksanaan administrasi pada dinasti ini adalah merupakan penyempurnaan administrasi yang pernah dikelola oleh Khalifah Umar ibn Khattab.

Adapun Bani Abbasiyyah bisa menjadi dinasti besar kerana tidak terlepas dari rakyatnya dan kemampuan dalam mengantisipasi kecenderungan-kecenderungan di masa depan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Ali, K., A Study Of Islamic History (India: Idarat Adabiyat, 1980)

Ameer Ali, The Spirit of Islam, Idarat-i Adabiyat-i, 1978.

Brockelmann, Carl, History of The Islamic Peoples (London: routledge, 1982).

Carl Brockelmann, History of Islamic People, London, routledge & Kegen Paul henley, 1982.

Cliveland, William L., A History of The Modern Middle East (San Fransisco: Westview Press, 1994).

Depag RI, Ensiklopedi Islam, Jakarta, CV. Anda Utama.

Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya (Bandung: Gema Risalah Press, 1989).

Fuad Mohd Fachruddin, Perkembangan Kebudayaan Islam (Jakarta: Bulan Bintang, 1985).

Fuad Muh. Fachruddin, Perkembangan Kebudayaan Islam, Jakarta, Bulan Bintang, 1986.

- G.E. Von Grunebaum, *Classical Islam*, George Allan & Unwin LTD, 1970.
- Hamilton A.R. Gibb, *Studies on the Civilization of Islam*, Kanada, Sounders of Toronto td., 1986.
- Harun Nasution, *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya I* (Jakarta: UI Press, 1974).
- Hasan Ibrahim Hasan, *Tarikh Islam*, Kairo, Maktabah al-Nahdhah al-Mishriyyah, Jilid II, 1976.
- Hasan Ibrahim Hasan, *Tarikh Islami* (Mesir: Maktabah Nahdhah, 1974).
- A. Hasjmy, *Sejarah Kebudayaan Islam*, Jakarta, Bulan Bintang, 1993.
- Hitti, Philip K., *History of The Arabs* (London: The Macmillan, 1974).
- J. suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah Ajaran Sejarah dan Pemikiran* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1994).
- J.H. Kramers (Ed.), *the Enciclopedy of Islam*, Netherlands, e.J. Brill, 1967.
- Joesoef Sou'yb, *Sejarah Daulah Umayyah I* (Jakarta: Bulan Bintang, 1977).
- Jurji Zaidan, *History of Islam Civilization*, New Delhi, Kitab Bhavan, 1978.
- Kennedy, Hugh, *The Prophet and The Age of The Caliphate* (London and New York: Longman, 1991).

- M. Lombard, *The Golden Age of Islam*, New York, North Holland Publishing Company, 1975.
- Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara Ajaran Sejarah dan Pemikiran* (Jakarta: UI Press, 1990).
- Nasir, Syed Mahmudun, *Islam its Concept and History* (New Delhi: Kitab Bhavan, 1981).
- Nurcholish Madjid, *Islam Doktrin dan Peradaban* ( Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina, 1992).
- Philip K. Hitti, *History of The Arab*, Macmillan Press td., 1970.
- Schimel, Annemarie, *Islam An Introduction* (New York: University of New York, 1972).
- Shaban, M.A., *Islamic History A new Interpretation I* (London: Cambridge, 1976).
- Stephan and Renard, nandy, *Concise Enciclopedia of Arabic Civilization* (Amsterdam: Jambatan, 1966).
- Syalaby, Ahmad, *Tarikh Al-Islami wa Hadhrotul Islamiyyah* (Mesir: Maktabah Nahdhah, 1978).
- Syed Mahmudunnasir, *Islamic Its Concepts and History*, New Delhi, kitab Bhavan, 1981.
- Watt, W. Montgomery, *The Majesty That Was Islam* (London: Sidgwich, 1976).
- Zaidan, Jurzi, *Tarikh Tamaddun al-Islami* (Beirut: Dar Maktabah Hayah, 1967).

